



Kunjungan President Asia
Center Perancis
hal 3



Kasad Ingatkan Tentang
Ancaman Nyata bagi Bangsa
Indonesia
hal. 7



Menko Bidang Kemaritiman
dan Wakasal Bahas Potensi
Daerah Pesisir Indonesia
hal. 9



Gubernur Lemhannas RI
Terima *Courtesy Call*
Delegasi Perancis
hal. 11



Petinggi KPK, Kejaksaan, dan Polri Hadiri Diskusi Panel dengan Peserta PPRA LIII Lemhannas RI

Plt. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol. (Purn) Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H., Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI Dr. Widyo Pramono S.H., M.M., M.Hum. dan Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus hadir sebagai narasumber dalam acara diskusi panel di hadapan Peserta PPRA LIII di Ruang NKRI, Gd. Panca Gatra Lt. 3 Lemhannas RI, Jumat (3/7)....(selengkapnya hal. 6)

Daftar Isi:

- Sosialisasi Penanganan Hukuman Disiplin PNS ...hal 2
- Penajaman dan Analisis Isu Strategis Labkurtannas ...hal 3
- Kunjungan *President Asia Centre* Perancis ...hal 3
- Gubernur Lemhannas RI Tekankan Pentingnya Pemimpin yang Berkarakter ...hal 4
- Menko Perekonomian RI Beri Ceramah Umum Kepada Peserta PPRA LIII ...hal 4
- Lemhannas RI dan IKAL Selenggarakan Peringatan Malam Nuzulul Quran dan Buka Puasa Bersama ...hal 5
- Petinggi KPK, Kejagung, dan Polri Hadiri Diskusi Panel dengan Peserta PPRA LIII Lemhannas RI ...hal 6
- Kasad Ingatkan Tentang Ancaman Nyata Bagi Bangsa Indonesia ...hal 7
- Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 ...hal 8
- KNDU Jajaki kerja Sama dengan Lemhannas RI ...hal 8
- Menko Bidang Kemaritiman dan Wakasal Bahas Potensi Daerah Pesisir Indonesia ...hal 9
- Lemhannas RI Selenggarakan RTD tentang Narkoba ...hal 10
- Gubernur Lemhannas RI Terima *Courtesy Call* Delegasi Perancis ...hal 11
- Gubernur BI Berikan Ceramah Kepada Peserta PPRA LIII ... hal 11
- Sosialisasi Jabatan Fungsional...hal 12

Tim Redaksi:

Pengarah:

Suhardi Alius

Penanggung Jawab:

E. Estu Prabowo

Redaktur Pelaksana:

Wahyu Widji Pamungkas

Penyunting/Editor:

Bambang Iman Aryanto

Staf Redaksi:

Trias Noverdi, Aditya Solehah, Erlin Dyah Pratiwi,
Ni Made Vira Saraswati, C. Hildamona Permatasari,
Magista Dian Fitriilia

Desain:

Bambang Iman Aryanto

Fotografer:

Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto

Sekretariat:

Linda Purnamasari, Gatot, Indah Winarni

Distribusi:

Sumurung, Supriyono

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka
Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

Sosialisasi Penanganan Hukuman Disiplin PNS



“Ada beberapa permasalahan yang perlu kita tangani dengan penanganan hukuman disiplin,” ungkap Kepala Biro Umum Brigjen Pol. Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si. dalam acara Pelatihan Penanganan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Auditorium Gajah Mada Gd. Panca Gatra Lt. 3 Lemhannas RI pada Selasa (30/6).

Acara yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Kepegawaian Lemhannas RI Kolonel ADM Drs. Nana Sujana, M.Si. ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai peraturan penanganan hukuman disiplin, khususnya di lingkungan Lemhannas RI.

Widyaiswara Madya Pusdiklat Badan Kepegawaian Nasional Harun Arsyad yang hadir sebagai narasumber dalam acara ini mengatakan bahwa PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dipandang sudah tidak relevan karena tidak mampu membuat PNS disiplin dan patuh pada ketentuan kinerja. Hal inilah yang mendasari diberlakukannya PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010, anggota PNS yang melanggar disiplin PNS akan mendapatkan penanganan hukuman sesuai dengan beban pelanggarannya. Tahapan penanganan hukuman tersebut mulai dari adanya dugaan sangkaan (kasus pelanggaran), pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, pemeriksaan, penjatuhan hukuman, hingga eksekusi. Dalam tahapan tersebut, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dapat mengajukan keberatan atau banding.

Usai pemaparan dari Harun Arsyad, acara yang dihadiri oleh para Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV Lemhannas RI ini ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab.



Penajaman dan Analisis Isu Strategis Labkurtannas

“**M**asih ada 4 provinsi yang mengundang perhatian khusus karena berada pada posisi kurang tangguh,” jelas Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dalam acara *Round Table Discussion* (RTD) “**Penajaman dan Analisis Isu Strategis (Berdasarkan Spasial dan Hubungan Fungsional)**” di Ruang Kresna, Gd. Asta Gatra Lt. 4, Selasa (30/6).

Acara yang diprakarsai oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) ini dihadiri narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Dalam Negeri RI.

Budi Susilo Soepandji menyatakan bahwa pembangunan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam indeks pembangunan manusia, kualitas daya saing, dan indeks ketahanan nasional. Meskipun demikian, secara spasial terdapat beberapa daerah yang perlu diwaspadai terutama pada aspek atau gatra ideologi, sosial budaya, dan ekonomi.

Senada dengan Budi Susilo Soepandji, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Kecuk Suharyanto berpendapat bahwa masalah kesejahteraan pada gatra sosial budaya yang berkaitan dengan gatra ekonomi berupa kemakmuran dan keadilan adalah masalah kemiskinan dan ketimpangan secara ekonomi maupun akses. “Gatra sosial budaya dan ideologi yang ke depan harus menjadi perhatian kita bersama supaya nilai ketahanan nasional bisa naik,” ujar Kecuk.

Sementara, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menegaskan



Foto : Humas Lemhannas RI

masalah dalam gatra ideologi terkait dengan Pancasila dan karakter bangsa. “Kondisi eksisting saat ini antara lain masih lemahnya penanaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang makin hari makin merosot sehingga nilai-nilai karakter kebangsaan ini belum menjadi landasan utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”, ujarnya.

Badan Intelijen Negara yang diwakili oleh Direktur Wilayah Sumatera dan Kalimantan Dr. Thony Saut Situmorang menerangkan isu strategis yang berhubungan dengan spasial dan hubungan fungsional dari gatra keamanan nasional. “Isu strategis keamanan global yang masih berfokus pada potensi ancaman terorisme dan radikalisme, dan isu sektarian yang semakin eskalatif”, kata Thoni. Untuk itu, negara tidak lagi menjadi aktor tunggal konflik, melainkan muncul kekuatan baru dari aktor non negara.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional serta beberapa pejabat struktural Lemhannas RI.

Kunjungan President Asia Center Perancis

“**L**emhannas is founded by Soekarno, until now we produce the leadership to the people of Indonesia,” ujar Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D E. A. saat menerima *Courtesy Call* President Asia Centre Perancis Jean François Di Meglio beserta jajarannya di Ruang Tamu Pimpinan Gd. Tri Gatra Lt. 1 Lemhannas RI, Rabu (1/7).

Kunjungan ini merupakan langkah awal penajakan kerja sama antara *Asia Centre* Perancis dengan Lemhannas RI. Usai kunjungan, dilanjutkan dengan diskusi yang mengangkat isu terkait Asia - Eropa. Dalam paparan yang berjudul **Parallel Worlds: Compared Behaviours of EU and ASEAN vis-à-vis China Over the Last Years and Food for Debate and Recommendations**, Jean François mengatakan bahwa Uni Eropa telah melakukan kerja sama yang cukup masif dengan salah satu negara Asia, yakni China. “*China has a very strong strategic. Second biggest maritime in the world,*” ujar Jean François dalam sesi diskusi di Ruang Gatotkaca Gd. Asta Gatra Lt. 3 Lemhannas RI.



Foto : Humas Lemhannas RI

Acara yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Sismennas Dr. Avanti Fontana ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Luar Negeri, perwakilan Kementerian Polhukam, perwakilan Kementerian Perindustrian, perwakilan Peserta PPRAL III, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.



Gubernur Lemhannas RI Tekankan Pentingnya Pemimpin yang Berkarakter

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki konsep pemikiran karena seorang pemimpin yang tidak tahu apa yang harus dilakukan menandakan bahwa pemimpin tersebut kurang memiliki *leadership skill* yang baik. Hal ini disampaikan dalam acara Jam Pimpinan PPRA LIII di Ruang NKRI, Gedung Panca Gatra Lt. 3 Lemhannas RI, Rabu (1/7).

Dalam paparannya, Budi Susilo Soepandji juga mengatakan bahwa seorang pemimpin juga harus memiliki karakter yang kuat. "Saya mengharapkan saudara memiliki karakter yang kuat, ini sangat penting sekali, jangan sampai saudara kaget dengan tindakan saudara sendiri yang berbeda dengan karakter saudara. Itu saya ingatkan, kalau tidak saudara akan digilas oleh zaman," ujar Budi Susilo Soepandji.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemimpin yang berkarakter kuat ditandai dengan dimilikinya visi dan misi yang jelas, satu



Foto : Humas Lemhannas RI

kata dan perbuatan, serta dapat dipercaya.

Mengakhiri paparannya di depan peserta PPRA LIII, Gubernur memberikan kesempatan tanya jawab dan pembagian CD oleh Gubernur Lemhannas RI yang berisi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Profesor Band.

Menko Perekonomian RI Beri Ceramah Umum Kepada Peserta PPRA LIII

Menteri Koordinator Perekonomian RI Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A. menyatakan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi global tahun 2015 cenderung moderat dengan perkembangan likuiditas global yang diperkirakan masih relatif tidak berubah dan komoditas global cenderung menurun. Hal tersebut disampaikan oleh Sofyan Djalil dalam kegiatan ceramahnya yang berjudul 'Kebijakan Pembangunan Ekonomi dalam Membangun Kedaulatan Bangsa' kepada peserta PPRA LIII di Ruang NKRI Gd. Panca Gatra Lt. 3 Lemhannas RI, Rabu (1/7).

Menurut Sofyan Djalil, meskipun pertumbuhan ekonomi global cenderung moderat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2015 mencapai 4,7% (yang sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 5%) dan mengalami defisit transaksi sebesar 3,8 miliar dolar AS (1,8% PDB).

Sofyan mengungkapkan, periode pemerintahan 2015-2019 mempunyai strategi pembangunan yang mencakup tiga dimensi yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut dapat dicapai dengan adanya kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban nasional, politik dan demokrasi yang stabil, serta



Foto : Humas Lemhannas RI

tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik sesuai dengan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

Untuk melakukan pembangunan nasional ke depan, Indonesia harus mampu mengatasi tantangan-tantangan seperti tantangan eksternal yaitu perekonomian global, tantangan pembangunan ekonomi diantaranya inflasi dan kesenjangan pembangunan, tantangan dalam pengelolaan keuangan negara yang salah satunya disebabkan oleh penerimaan sektor pajak yang belum optimal, dan tantangan dalam mendorong sektor riil seperti infrastruktur, elektrifikasi, permodalan, serta daya saing SDM.





Foto : Humas Lemhannas RI

Lemhannas RI dan IKAL Selenggarakan Peringatan Malam Nuzulul Quran dan Buka Puasa Bersama

“**B**ulan suci Ramadhan merupakan kesempatan bagi seluruh umat Islam di dunia untuk meningkatkan amal kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Oleh karena itu, selaku hamba-Nya sudah seharusnya kita menyambut bulan Ramadhan dengan melakukan amal kebaikan dalam dimensi *hablum minallah* maupun *hablum minannas*,” ujar Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., dalam acara Peringatan Nuzulul Quran 1436 H dan Buka Bersama di Gd. Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI pada Kamis (2/7).

Budi Susilo Soepandji juga mengatakan bahwa keistimewaan bulan puasa lainnya yakni ada pada Peristiwa Nuzulul Quran atau hari turunnya Alquran.

Alquran yang turun secara bertahap dalam kurun waktu lebih dari 22 tahun kemudian menjadi satu rangkaian yang sangat cermat, penuh makna, indah dan fasih gaya bahasanya, serta ketiadaan pertentangan di dalamnya. Hal ini semakin menguatkan bahwa Alquran benar-benar kalam Ilahi.

Selain dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., acara bertema **“Dengan Hikmah Nuzulul Quran, Kita Tingkatkan Iman dan Takwa kepada Allah SWT”** ini dihadiri oleh Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perindustrian Saleh Husin, S.E., M.Si., Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko, Ketua IKAL Jendral TNI (Purn.) Agum Gumelar beserta Anggota IKAL, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A, Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ardi Partadinata, M.H., M.Si., Ketua dan Pengurus Perista, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta para Pejabat Struktural di Lemhannas RI.

Acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Lemhannas RI (IKAL) bekerjasama dengan Lemhannas RI dan BRI KCP Lemhannas RI ini juga dihadiri oleh para peserta PPRA LIII dan PPSA XX Lemhannas RI.

Usai Sholat Magrib berjamaah, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi ceramah tentang Nuzulul Quran dan doa bersama yang dipimpin oleh penceramah Drs. H. Tasripin.

Petinggi KPK, Kejaksaan, dan Polri Hadiri Diskusi Panel dengan Peserta PPRA LIII Lemhannas RI



Plt. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol. (Purn) Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. mengatakan bahwa korupsi yang telah menggerogoti seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan tahun 1945 dapat meruntuhkan ketahanan nasional. Pemberantasan korupsi dipandang masih belum optimal karena adanya aturan yang tumpang tindih serta *mindset* kementerian dan lembaga yang harus diubah. Pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dengan *will*, namun juga komitmen.

“Melihat pentingnya ketahanan nasional maka hal yang mendesak untuk dilakukan oleh tiap komponen bangsa adalah memastikan terwujudnya ketahanan nasional yang handal melalui *core* bisnis masing-masing,” ujar Taufiequrachman selaku narasumber dalam acara diskusi panel di hadapan Peserta PPRA LIII di Ruang NKRI, Gd. Panca Gatra Lt. 3 Lemhannas RI, Jumat (3/7).

Dalam kegiatan bertema **“Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional”** tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI Dr. Widyo Pramono S.H., M.M., M.Hum. menyatakan bahwa kebijakan penanganan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Indonesia dapat dilaksanakan secara simultan dan sinergis

melalui pemberdayaan kerjasama dengan instansi hukum yang lain.

“Adalah menjadi PR kita bersama tentang bagaimana sama-sama memperkuat, dan membangun negara kita dengan baik. Oleh karena itulah sinergitas aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi itu mutlak dan harus sejalan secara simultan,” ujar Widyo Pramono.

Di sisi lain, Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus mengatakan bahwa terdapat lima konsep pemberantasan korupsi yang berlaku secara universal, yaitu pencegahan, kriminalisasi (penegakan hukum), *general technical assistant* atau *supporting*, pengembalian aset, dan kerjasama internasional.

“Suatu upaya untuk menyempurnakan apa yang kita inginkan harus ada tujuan dan target yang ingin dicapai,” pungkas Ahmad Wiyagus.

Usai paparan dari ketiga narasumber, acara yang dimoderatori oleh Tenaga Pengajar Bidang Hukum dan HAM Irjen Pol. Dr. H.M. Said Saile, M.Si. ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Kasad Ingatkan Tentang Ancaman Nyata Bagi Bangsa Indonesia



Foto: Humas Lemhannas RI

“**B**erdasarkan Teori Prinsip Populasi dan Teori Pergeseran Latar Belakang dan Lokasi Konflik Dunia, bahwa percepatan laju jumlah penduduk, krisis energi, dan terbatasnya ketersediaan pangan akan menyebabkan pergeseran latar belakang dan lokasi konflik dunia ke kawasan ekuator,”

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf TNI AD Jenderal Tri Gatot Nurmantyo saat memberikan pembekalan untuk peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX di Auditorium Gadjah Mada, Gd. Panca Gatra Lt. 3 Lemhannas RI, Senin (6/7).

Dalam paparannya yang berjudul “**Kewaspadaan dalam Menghadapi Ancaman Nyata Bangsa Indonesia**”, Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa tahun 2043 nanti jumlah penduduk dunia diprediksi mencapai 12,3 miliar jiwa.

Pertambahan jumlah penduduk tersebut berbanding terbalik dengan kondisi ketersediaan pangan dan air sehingga memicu pencarian sumber energi, pangan dan air ke daerah ekuator. Hal ini harus diwaspadai karena akan memicu terjadinya konflik di daerah ekuator, mengingat letak geografis Indonesia yang berada di wilayah ekuator.

Di samping itu, lanjut Gatot Nurmantyo, *Proxy War* juga menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai oleh bangsa Indonesia. “*Proxy War* merupakan perang melalui berbagai aspek berbangsa dan bernegara,” ungkap Tri Gatot Nurmantyo.

Untuk menghadapi *Proxy War*, Indonesia perlu mengoptimalkan modal geografi, membentuk Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim, serta membangun kembali semangat gotong-royong yang menjadi benang merah kekuatan dan keberhasilan bangsa selama ini.

Acara yang ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab ini turut dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Wakil Gubernur Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI M. Nasir Majid, serta para Pejabat Struktural Lemhannas RI.

Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015

Lemhannas RI menyelenggarakan sosialisasi terkait pelaksanaan anggaran tahun 2015 dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan RI di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra Lt. 2 Lemhannas RI, pada Senin (6/7).

Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh segenap personel Lemhannas ini membahas mengenai seluk beluk penganggaran di bidang pemerintahan, kesuksesan mengelola dan menyerap anggaran negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dalam mengimplementasikan bagan akun standar dan biaya perjalanan dinas.

“Adanya kesamaan pemahaman dan persepsi ini memungkinkan unit kerja Lemhannas dapat melaksanakan anggarannya sesuai dengan aturan yang berlaku guna percepatan tercapainya sasaran dan target yang telah ditetapkan”, ujar Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI, Marsma TNI Yoyok Yekti Setyono dalam sambutannya.

Dra. Rina Robiati, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini menyatakan masalah dalam pelaksanaan anggaran biasanya terkait dengan penyerapan anggaran. Hal ini disebabkan karena kendala institusional,



Foto: Humas Lemhannas RI

kendala struktural, dan kendala kultur atau kebiasaan dalam pengelolaan anggaran.

Rina melanjutkan, strategi pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien harus dipersiapkan sejak tahun anggaran sebelumnya seperti persiapan untuk lelang pengadaan barang dan jasa untuk menghindari rendahnya penyerapan pada triwulan pertama. Selain itu, pejabat pengelola keuangan juga harus memahami prinsip-prinsip perjalanan dinas menurut PMK 113/ 2012 dan prinsip standar biaya masukan menurut PMK 57/2015 agar tidak menjadi temuan BPK.

KNDU Jajaki kerja Sama dengan Lemhannas RI

“Indonesia is one of the leading nation in ASEAN,” ujar President of Korea National Defence University (KNDU) Lieutenant General Wee Seung Ho mengawali sesi diskusi setelah sebelumnya diterima dalam sebuah *Courtesy Call* oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. di Ruang Nusantara II Gd. Tri Gatra Lt. 1 Lemhannas RI, Selasa (7/7).

Dalam diskusi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI tersebut, Wee Seung Ho menjelaskan bahwa KNDU merupakan universitas pertahanan unggulan di Korea sebagai pusat berkumpulnya ahli keamanan dalam bidang militer yang berfokus kepada kebijakan pertahanan dan keamanan nasional (*national defence and security policy*) serta turut berperan dalam memaksimalkan *soft power*, meningkatkan program keamanan nasional, dan sebagai dasar dari kedamaian dan kesejahteraan Korea.

Pertemuan ini memiliki arti penting sebagai dasar peninjakan kerja sama antara Lemhannas RI dengan KNDU di masa yang akan datang.



Foto: Humas Lemhannas RI

Didit Herdiawan menyambut baik pertemuan ini dengan menawarkan langkah peninjakan kerja sama lebih lanjut. “We can share knowledge. How to build Indonesia and Korea Merit. How to deal our culture or share our experties,” ujar Didit Herdiawan.

Acara ini turut dihadiri oleh Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI M. Nasir Majid, Direktur Pengkajian Bidang Politik Drs. Hanif Salim, M.A., serta Kepala Biro Humas Lemhannas RI Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc.





Menko Bidang Kemaritiman dan Wakasal Bahas Potensi Daerah Pesisir Indonesia

“**K**alau kita bicara daerah pesisir, yang di atas air, yang di dalam air, yang di dasar laut, dan di bawah laut adalah milik kita,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc. selaku panelis dalam kegiatan diskusi panel peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XX (PPSA XX) Lemhannas RI di Ruang Bhinneka, Gd. Pancagatra Lt. 3, Lemhannas RI, pada Selasa (7/7).

Indroyono mengatakan bahwa potensi pesisir Indonesia sangat beragam, seperti penangkapan dan budaya ikan, rumput laut, sektor pariwisata, pelabuhan dan galangan kapal, serta minyak bumi dan gas yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Untuk memacu pengembangan wilayah pesisir, dibuatlah kawasan ekonomi khusus pesisir yang salah satunya akan dibangun di Lombok, Mandalika,” papar Dwisuryo Indroyono. Kawasan ekonomi terintegrasi di daerah pesisir ini merupakan bentuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan penduduk pesisir dengan menggabungkan industri rumahan, *farming*, *eco tourism*, *water tourism*, industri kehutanan, pelabuhan, dan lain sebagainya dalam satu kawasan.

Pada diskusi panel yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bid. Nasional dan Strategi Lemhannas RI Mayjen

TNI (Purn) Mulya Setiawan, M.Sc., hadir Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Widodo, S.E., M.Sc dan Tenaga Pengkaji Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Marsekal Muda TNI Bonar H. Hutagaol, M.M. sebagai panelis

Widodo menyebutkan bahwa potensi sumber daya pesisir dan laut Indonesia yang besar ternyata belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. TNI AL sebagai salah satu komponen bangsa turut serta dalam pembinaan masyarakat pesisir dengan berbagai program kegiatan melalui pendidikan, latihan, serta pembangunan daerah. “Pembinaan masyarakat pesisir tersebut diharapkan akan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan lingkungan hidup di wilayah laut dan pesisir serta kesadaran pada berbagai aspek maritim,” tegas Widodo.

Sementara itu, Bonar Hutagaol menyampaikan Rusia mengambil Krimea untuk memperpanjang garis pantai, sedangkan kita yang mempunyai garis pantai yang sangat panjang tetapi tidak mampu mengurusnya.

Setelah ketiga panelis menyampaikan paparan, acara diakhiri dengan sesi diskusi dengan para peserta PPSA XX Lemhannas RI.

Lemhannas RI Selenggarakan RTD tentang Narkoba

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. secara resmi membuka acara Round Table Discussion bertema **“Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui Pendekatan Sosial Budaya Indonesia Darurat Narkoba Guna Menyelamatkan Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional”** di Ruang Kresna, Gd. Asta Gatra Lt. 4 Lemhannas RI pada Selasa (7/7).

Acara ini bertujuan untuk mendengarkan paparan dari para narasumber guna memberikan masukan bagi bahan kajian di Lemhannas RI yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Samsudi, M.Si selaku narasumber dalam acara ini mengatakan bahwa di tahun 2011, lebih dari 5 juta penduduk Indonesia yang berusia 10-59 tahun merupakan pemakai narkoba. Hal tersebut menempatkan status Indonesia ke dalam kondisi darurat narkoba. Oleh karenanya, sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 54 menyatakan bahwa para

pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sehubungan dengan hal itu, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. menyatakan bahwa tahapan yang harus dilakukan dalam menanggulangi narkoba yakni tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Deputi Koordinasi Bidang Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dr. Haswan Yunaz, M.M., M.Si. mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan.

Sementara itu, Kasubdit Bidang Pertahanan Bappenas RI Ir. Gunarta, M.E. mengatakan bahwa apabila tidak ada upaya pencegahan dan penanggulangan, pengguna narkoba diproyeksikan pada akhir tahun 2019 akan mencapai angka sebesar 4,9 persen setara dengan 7,4 juta orang.





Gubernur Lemhannas RI Terima *Courtesy Call* Delegasi Perancis

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. didampingi oleh Tenaga Profesional Bidang Sumber Daya Alam Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. menerima *Courtesy Call* Delegasi Perancis yakni Country Manager Alsetex Daniel Rossi dan Gilbert Gennet di Ruang Tamu Pimpinan Gd. Tri Gatra Lt. 1 Lemhannas RI, Rabu (8/7).

Kunjungan Daniel Rossi dan Gilbert Gennet ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Kedutaan Besar Perancis dengan Lemhannas RI setelah penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Terorisme dan Deradikalisme yang digelar pada 13 April lalu di Lemhannas RI.

Perusahaan Alsetex merupakan sebuah perusahaan milik Perancis yang berada di Vietnam dan bergerak di bidang industri pertahanan dan keamanan.

Budi Susilo Soepandji menyambut baik kunjungan kehormatan ini dan berharap akan ada peningkatan kerja sama yang lebih strategis di masa yang akan datang antara Lemhannas RI dengan Perancis.

Gubernur BI Berikan Ceramah Kepada Peserta PPRA LIII

Gubernur Bank Indonesia Agus D. W. Martowardojo mengatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi makroprudensial, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Demikian disampaikan Agus Martowardojo saat acara diskusi panel dengan para Peserta PPRA LIII Lemhannas RI di Ruang NKRI, Gd. Panca Gatra Lt. 3 Lemhannas RI, Rabu (8/7).

Dalam paparannya yang berjudul **"Peran Bank Sentral dan Relevansinya Bagi Kestinambungan Pertumbuhan Ekonomi"**, Agus Martowardojo mengatakan bahwa dalam kebijakan moneter dan pengelolaan makro ekonomi, penting untuk menjaga keseimbangan antara sisi *supply* dengan sisi *demand* agar mencapai pertumbuhan ekonomi yg berkelanjutan.

Di samping itu, Agus Martowardojo juga menyampaikan pentingnya menjaga tingkat inflasi rendah dan stabil guna meningkatkan kepastian dunia usaha, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga daya saing demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Mengenai masalah struktural perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan terkendala oleh permasalahan struktural yaitu defisit transaksi berjalan. Hal ini membuat rupiah terus mengalami tekanan fundamental.

Oleh karenanya, Bank Indonesia menetapkan beberapa arah kebijakan, salah satunya yakni menempuh kebijakan moneter yang prudent dan konsisten dalam mengarahkan inflasi menuju sasaran yg telah ditetapkan, serta untuk menurunkan defisit transaksi berjalan.

Usai paparan materi, acara diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan para Peserta PPRA LIII Lemhannas RI.



Sosialisasi Jabatan Fungsional

“**S**esuai amanat dari Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diamanatkan bahwa jabatan ASN ada tiga yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan fungsional,” ujar Kepala Bagian Kepegawaian Lemhannas RI Kolonel ADM Drs. Nana Sujana, M.Si. saat melakukan sosialisasi “Pengembangan Karir Jabatan Profesional”.

Sosialisasi tersebut mengundang narasumber dari Widyaiswara Madya Pusat Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Drs. Suparjiyanta yang menyampaikan tentang perubahan tata kelola aparatur sipil negara di Ruang Syailendra, Gd. Asta Gatra Lt. 3, pada Kamis (8/7).

Sebagai konsekuensi dari disahkannya UU ASN, pegawai negeri sipil akan berubah nomenklaturnya menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan memiliki sistem pengelolaan yang baru sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi di Indonesia. “Pengelolaan PNS ini harus bergeser mengarah ke spesialisasi profesi masing-masing, sehingga akan menjadi lebih profesional,” tegas Nana Sujana.

Jabatan yang paling mempengaruhi struktur PNS saat ini adalah ditiadakannya sistem eselon dan munculnya jabatan fungsional yang terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional umum hanya untuk golongan 1 dan 2, sementara jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kompetensi masing-masing ASN dengan sistem kompetisi pangkat antar ASN yang lebih adil.

Hal senada diungkapkan oleh Suparjiyanta, “Arah pengembangan karir pegawai negeri sipil dalam arti ASN ke depan memang diarahkan untuk memperbanyak jabatan fungsional tertentu, dimana pengembangan karir jabatan fungsional tertentu ditentukan oleh penetapan angka kredit”. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan fungsional yang pengembangan karirnya melalui penetapan angka kredit (*credit point*) untuk naik pangkat atau jabatan.

Acara yang dihadiri oleh segenap PNS Lemhannas RI ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi dengan Bagian Kepegawaian Lemhannas RI.



Foto : Humas Lemhannas RI